



LURAH JEPITU
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN JEPITU
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH JEPITU,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor

- 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 - 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

4

Gunungkidul Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);

18. Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Jepitu Tahun 2020-2027 (Lembaran Kalurahan Jepitu Tahun 2025 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Jepitu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Jepitu Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Jepitu Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JEPITU
DAN
LURAH JEPITU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jepitu Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	4.089.643.275,00
2. Belanja Desa	Rp	4.387.561.599,00
Surplus/Defisit	Rp	(297.918.324,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	467.918.324,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	170.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	297.918.324,00
 Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Lurah dapat

mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

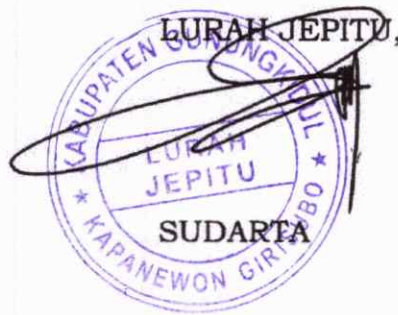
Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Jepitu.

Ditetapkan di : Jepitu

Pada tanggal : 31 Desember 2025



Diundangkan di : Jepitu

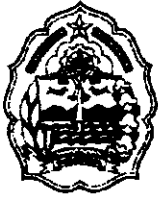
Pada tanggal : 31 Desember 2025

CARIK JEPITU,



ZANURI RAHMAN

LEMBARAN KALURAHAN JEPITU TAHUN 2025 NOMOR 7



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GIRISUBO
PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦱꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦶꦫꦶꦱꦸꦧꦺ

Jalan Botodayaan No. 03, Jepitu, Girisubo, Gunungkidul Kode Pos : 55883
Posel : jepitu.girisubo@gmail.com Laman : desa jepitu.gunungkidulkab.go.id

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KALURAHAN
DAN BADAN PERMUSWAYARATAN KALURAHAN**

Nomor : 07 /BA/Pemkal-JPT/2025 (Pemkal)
Nomor : 07 /BA/Bamuskal-JPT/2025 (Bamuskal)

**PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Balai Kalurahan Jepitu Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. SUDARTA : Lurah Jepitu yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Jepitu yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. RUBIYANTO : Ketua Bamuskal Jepitu yang bertindak untuk dan atas nama Badan Permasyarakatan Kalurahan Jepitu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah melaksanakan Musyawarah pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jepitu Tahun Anggaran 2026 dan dihadiri Pamong Kalurahan Jepitu dan anggota Bamuskal Jepitu sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir;
2. **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA** untuk kemudian dapat dievaluasi pada tingkatan lebih lanjut;
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan rancangan Peraturan Kalurahan kepada Panewu Girisubo untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya berita acara ini.

Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk d

apat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KABUPATEN GUNUNGKIDULUR
PHAK KEDUA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALurahan
JEPITU
KAPANEWON GIRISUBO
RUBIYANTO

KABUPATEN GUNUNGKIDULUR
PHAK PERTAMA
LURAH
JEPITU
KAPANEWON GIRISUBO
SUDARTA

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL: Jumat/12 Desember 2025
 TEMPAT : Balai Kalurahan Jepitu
 ACARA : Musyawarah Pembahasan/Penyepakatan Rancangan Perkal APBKal Tahun 2026

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	SUDARTA	Lurah	Jepitu	1. 
2.	ZANURI RAHMAN	Carik	Manukan	2. 
3.	AYOGA SUKARJITA	Jagabaya	Jepitu	3. 
4.	-	Ulu-ulu	-	4. 
5.	SUPRIYANTA	Kamituwa	Pendowo	5. 
6.	SUHARJANTO	Kaur Tata Laksana	Manukan	6. 
7.	SUKAJA	Kaur Pangripta	Manukan	7. 
8.	-	Kaur Danarta	-	8. 
9.	RUBIYANTO, S.Pd.I	Ketua Bamuskal	Nglaban	9. 
10.	SUKIRNA, S.IP	Wakil Ketua	Manukan	10. 
11.	RUJITO, S.IP	Sekretaris	Pendowo	11. 
12.	PROBO HUBRIANTO	Kabid Pemerintahan	Jepitu	12. 
13.	WINARNA	Kabid Pembangunan	Janganmati	13. 
14.				14. 
15.	SUMARWOTO	Anggota	Klumpit	15. 
16.	WASIDO	Anggota	Pelem	16. 
17.	DWI ASTUTI	Anggota	Janganmati	17. 

KETUA BAMUSKAL JEPITU,

 RUBIYANTO, S.Pd.I


Jepitu, 12 Desember 2025
 LURAH JEPITU,

 SUDARTA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	62.400.800,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.022.242.475,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.089.643.275,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	750.372.197,12	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.504.586.113,88	
5.3.	Belanja Modal	2.069.003.288,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	63.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.387.561.599,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(297.918.324,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	467.918.324,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	467.918.324,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	170.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	170.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	297.918.324,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jepitu, 31 Desember 2025
 Lurah

 SUDARTA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	62.400.800,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.022.242.475,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.089.643.275,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.310.795.449,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	914.476.166,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.976.000,00	ADD, DLL
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.976.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	588.782.300,00	ADD, DLL, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	588.782.300,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.421.117,12	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	41.421.117,12	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	125.098.308,88	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.098.308,88	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	59.520.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	59.520.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, Listrik dll)	3.170.280,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	597.780,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.572.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.508.160,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.508.160,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	6.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.280.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.280.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.280.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keersipan	34.949.800,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	478.800,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	479.800,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	16.040.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.040.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.220.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.250.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	14.960.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.960.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	105.569.600,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.870.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.870.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	3.840.000,00	ADD, DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.390.000,00	ADD, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.390.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.614.600,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.614.600,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	7.000.000,00	ADD, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	420.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	420.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	34.410.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.410.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	5.450.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	25.700.000,00	ADD, PAD, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.700.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	13.075.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	13.075.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.800.000,00	ADD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	252.519.883,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	251.319.883,00	PAD
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	251.319.883,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.200.000,00	ADD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.567.979.693,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	10.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	10.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	151.451.900,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	38.931.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.931.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.450.000,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.450.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.350.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	10.080.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.080.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	86.640.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.640.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	285.477.368,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	60.003.288,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	60.003.288,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat (**)	225.474.080,00	DDS, PBM
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	225.474.080,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	82.025.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	82.025.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.025.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	2.036.726.325,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (**)	2.000.000.000,00	PBP
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	2.000.000.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	2.550.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupaten	34.176.325,00	PBM
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.176.325,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	220.653.500,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.051.500,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	3.051.500,00	PBM
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.051.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	161.089.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	41.900.000,00	DDS, PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.900.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	58.850.000,00	ADD, DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.850.000,00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	60.339.000,00	PBP
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.339.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.305.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.305.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.305.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	52.208.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	37.712.000,00	PBH, PBP
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.712.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.800.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	1.530.000,00	ADD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.530.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.094.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.094.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.072.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.072.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>224.532.957,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.400.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	3.400.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	219.902.957,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	1.170.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.170.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	218.732.957,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	218.732.957,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.230.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.230.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.230.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>63.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	57.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	57.600.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.387.561.599,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(297.918.324,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	467.918.324,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	170.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	297.918.324,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDdes : APBDes Awal

Sumberdana : PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	62.400.800,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.500.800,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	18.100.000,00	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	42.800.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	62.400.800,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>226.863.883,00</u>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	30.344.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	30.344.000,00	Sumber PAD
5.1.	Belanja Pegawai	30.344.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	30.344.000,00	
5.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Desa	30.344.000,00	
1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	15.200.000,00	
1.4.91.	Pengisian Perangkat Desa	15.200.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	11.200.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	800.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	3.650.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	4.000.000,00	
5.2.4.2.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	4.000.000,00	
1.5.	Sub Bidang Pertanahan	251.319.883,00	
1.5.90.	Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	251.319.883,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	251.319.883,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	540.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	120.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	300.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	64.525.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	525.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	64.000.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	186.254.883,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	186.254.883,00	
3.	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	35.450.000,00	
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	35.450.000,00	
3.2.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	35.450.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.450.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	35.450.000,00	
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	35.450.000,00	
	JUMLAH BELANJA	332.313.883,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(269.913.083,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	269.913.083,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	269.913.083,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	269.913.083,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	859.910.300,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	859.910.300,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	859.910.300,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>904.578.995,00</u>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	867.590.595,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.040.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	44.040.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.040.000,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	44.040.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	556.566.300,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	556.566.300,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	556.566.300,00	
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	556.566.300,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.421.117,12	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	41.421.117,12	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.421.117,12	
5.1.3.2.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	2.801.052,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.748.096,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	35.871.969,12	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	119.384.737,88	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	119.384.737,88	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	19.882.500,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	7.682.500,00	
5.2.1.2.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	2.000.000,00	
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	1.800.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.200.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	71.820.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	52.020.000,00	
5.2.2.6.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	19.800.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.850.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.550.000,00	
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	2.300.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	22.812.237,88	
5.2.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	10.440.000,00	
5.2.5.2.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	7.032.000,00	
5.2.5.3.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	1.140.000,00	
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	4.200.000,00	
5.2.5.7.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	237,88	
1.1.06.	Penyediaan Tunjangan BPD	59.520.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	59.520.000,00	
5.1.4.	Tunjangan BPD	59.520.000,00	
5.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan BPD	59.520.000,00	
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Mekan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.170.280,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	597.780,00	
5.1.4.	Tunjangan BPD	597.780,00	
5.1.4.91.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD	597.780,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.572.500,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.572.500,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	262.500,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	150.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.160.000,00	
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.508.160,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.508.160,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	43.508.160,00	
5.2.5.8.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	40.320.000,00	
5.2.5.91.	Jaminan Ketenagakerjaan RT/RW	3.188.160,00	
1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.280.000,00	
1.2.94.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.280.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.280.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	700.000,00	
5.2.5.7.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	700.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	2.580.000,00	
5.2.6.2.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	2.580.000,00	
1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keesaipan	1.729.800,00	
1.3.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	479.800,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	479.800,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	479.800,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	196.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	283.800,00	
1.3.90.	Penyusunan Monografi Desa	1.250.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.250.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	30.779.600,00	
1.4.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	1.200.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.200.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	
1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.690.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.690.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.040.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	120.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	920.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.650.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	3.650.000,00	
1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.614.600,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.614.600,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.614.600,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	600.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.014.600,00	
1.4.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.250.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.250.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.250.000,00	
1.4.90.	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	5.450.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.450.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	5.450.000,00	
1.4.91.	Pengisian Perangkat Desa	700.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	700.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	200.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.4.92.	Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	13.075.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	13.075.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	13.075.000,00	
5.1.2.99.	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah	13.075.000,00	
1.4.96.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.800.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.800.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.800.000,00	
1.5.	Sub Bidang Pertanahan	1.200.000,00	
1.5.94.	Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.200.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	600.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	600.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	600.000,00	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	600.000,00	
3.	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>27.701.000,00</u>	
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.700.000,00	
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	13.700.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.700.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	11.100.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.000.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	2.000.000,00	
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.305.000,00	
3.3.93.	Operasional Karang Taruna	4.305.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.305.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.305.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	164.000,00	
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Keba	1.771.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.250.000,00	
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.696.000,00	
3.4.92.	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	1.530.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.530.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.530.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	60.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	270.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	
3.4.95.	Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.094.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.094.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.094.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	378.000,00	Sumber ADD
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	216.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	
3.4.96.	Operasional PKK	6.072.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.072.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.072.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	600.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	72.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	932.280.995,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(72.370.695,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	72.370.695,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	72.370.695,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	72.370.695,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	847.905.975,00	
4.2.1.	Dana Desa	847.905.975,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	847.905.975,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>74.840.000,00</u>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	6.000.000,00	
1.1.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	6.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.000.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.000.000,00	
1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	33.220.000,00	
1.3.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	16.040.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.040.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.840.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	240.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.100.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.300.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	800.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	7.500.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	900.000,00	
1.3.05.	Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.220.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.220.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	120.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	
1.3.91.	Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	14.960.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.960.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.660.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	60.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.800.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.300.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	8.300.000,00	
1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	35.620.000,00	
1.4.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.870.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.870.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.870.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	180.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.940.000,00	
1.4.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	2.640.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.640.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	60.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.400.000,00	
1.4.06.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	26.110.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.110.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	810.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	60.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	450.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.800.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	600.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	4.200.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	300.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	5.200.000,00	
5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	5.200.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	6.000.000,00	
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	6.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	9.000.000,00	
5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.000.000,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	301.930.288,00	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	10.800.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
2.1.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	10.800.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.800.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	10.800.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	129.052.000,00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Keles Bumil, Lansia, Insentif)	12.672.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.672.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	11.472.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	222.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	11.250.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	600.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	600.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	600.000,00	
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.310.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.310.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	5.850.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.850.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	600.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	600.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.860.000,00	
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	1.860.000,00	
2.2.91.	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.350.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	1.550.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.400.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	800.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	800.000,00	
2.2.94.	Pembelian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	10.080.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.080.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	10.080.000,00	
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	10.080.000,00	
2.2.98.	Insentif kader kesehatan/KB	86.640.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.640.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	86.640.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	86.640.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85.003.288,00	
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	60.003.288,00	Sumber DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.3.	Belanja Modal	60.003.288,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	60.003.288,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	58.278.288,00	
5.3.5.5.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	1.725.000,00	
2.3.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	25.000.000,00	<i>Sumber DDS</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
5.2.6.4.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	25.000.000,00	
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	82.025.000,00	
2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	82.025.000,00	<i>Sumber DDS</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.025.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.200.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	825.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	825.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	80.000.000,00	
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	80.000.000,00	
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	
2.6.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	<i>Sumber DDS</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.8.	Sub Bidang Pariwisata	2.550.000,00	
2.8.01.	Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Mhik Desa	2.550.000,00	<i>Sumber DDS</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.050.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.050.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	600.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	600.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	900.000,00	
3.	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>56.400.000,00</u>	
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	51.600.000,00	
3.2.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	6.450.000,00	<i>Sumber DDS</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.850.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.700.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.200.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	2.400.000,00	
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	45.150.000,00	<i>Sumber DDS</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.150.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	22.350.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	22.350.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	22.800.000,00	
5.2.4.2.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	22.800.000,00	
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.800.000,00	
3.4.01.	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.800.000,00	<i>Sumber DDS</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.800.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	4.800.000,00	
4.	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>224.532.957,00</u>	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.400.000,00	
4.2.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	3.400.000,00	<i>Sumber DDS</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	2.400.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	1.000.000,00	
5.2.7.5.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	1.000.000,00	
4.5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	219.902.957,00	
4.5.01.	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	1.170.000,00	<i>Sumber DDS</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.170.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.170.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	60.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	900.000,00	
4.5.99.	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	218.732.957,00	<i>Sumber DDS</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	218.732.957,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	218.732.957,00	
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	218.732.957,00	
4.6.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.230.000,00	
4.6.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pempdes)	1.230.000,00	<i>Sumber DDS</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.230.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	450.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	300.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	600.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	600.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	180.000,00	
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	180.000,00	
5.	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u>	63.600.000,00	
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.000.000,00	
5.1.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.000.000,00	Sumber DDS
5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000,00	
5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000,00	
5.2.00.	Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	Sumber DDS
5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	57.600.000,00	
5.3.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	57.600.000,00	Sumber DDS
5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	721.303.245,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	126.602.730,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	43.397.270,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	43.397.270,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	170.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	170.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(126.602.730,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	194.426.200,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	194.426.200,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	194.426.200,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>420.052,00</u>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	52,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	52,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	52,00	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	52,00	
1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	420.000,00	
1.4.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	420.000,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	420.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	420.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	60.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>234.650.495,00</u>	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	200.474.080,00	
2.3.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	200.474.080,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.474.080,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	197.999.080,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	196.799.080,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.475.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.475.000,00	
2.8.	Sub Bidang Pariwisata	34.176.325,00	
2.8.92.	Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupaten	34.176.325,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.176.325,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	34.176.325,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	34.176.325,00	
3.	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>33.000.000,00</u>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.000.000,00	Sumber PBH
3.4.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	33.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	33.000.000,00	
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	33.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	268.070.457,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(73.644.257,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	73.644.257,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	73.644.257,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	73.644.257,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : PBK

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.	BELANJA		
3.	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	3.051.500,00	
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.051.500,00	
3.1.07.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	3.051.500,00	<i>Sumber PBK</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.051.500,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.401.500,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	6.500,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	195.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	600.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	600.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	1.050.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.051.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.051.500,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.051.500,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.051.500,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	3.051.500,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jepitu, 31 Desember 2025
Lurah

SUDARTA



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : PBP

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	2.120.000.000,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	2.120.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.120.000.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>23.550.000,00</u>	
1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	23.550.000,00	
1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	700.000,00	Sumber PBP
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	700.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	700.000,00	
1.4.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.750.000,00	Sumber PBP
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.750.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.550.000,00	
1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.300.000,00	Sumber PBP
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.700.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.700.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	600.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	600.000,00	
1.4.91.	Pengisian Perangkat Desa	9.800.000,00	Sumber PBP
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.800.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	9.800.000,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.031.399.000,00</u>	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	31.399.000,00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	26.259.000,00	Sumber PBP
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.259.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	26.259.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	26.259.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.140.000,00	Sumber PBP
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.140.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.540.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	90.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.450.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	800.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	800.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	1.800.000,00	
2.8.	Sub Bidang Pariwisata	2.000.000.000,00	
2.8.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik ***)	2.000.000.000,00	Sumber PBP
5.3.	Belanja Modal	2.000.000.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	2.000.000.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	2.000.000.000,00	
3.	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	65.051.000,00	
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	60.339.000,00	
3.2.95.	Pembinaan lembaga desa pelestari adat	60.339.000,00	Sumber PBP
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.339.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	33.169.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	540.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.654.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	30.975.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	14.950.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	13.200.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.750.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.020.000,00	
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	10.020.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	2.200.000,00	
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	2.200.000,00	
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.712.000,00	
3.4.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.712.000,00	Sumber PBP
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.712.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.712.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	147.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.325.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.120.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jepitu, 31 Desember 2025

Lurah

SUDARTA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : DLL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
4.3.6.	Bunga Bank	5.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.000.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	10.541.519,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	10.541.519,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	2.936.000,00	Sumber DLL
5.1.	Belanja Pegawai	2.936.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	2.936.000,00	
5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	2.936.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.872.000,00	Sumber DLL
5.1.	Belanja Pegawai	1.872.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.872.000,00	
5.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Desa	1.872.000,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	5.733.519,00	Sumber DLL
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.733.519,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.192.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.192.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.541.519,00	
5.2.5.7.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	1.270.759,50	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	1.270.759,50	
	JUMLAH BELANJA	10.541.519,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.541.519,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.541.519,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.541.519,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	5.541.519,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jepitu, 31 Desember 2025





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

Gunungkidul - Amanah, Ragahe, Naghe, Nge

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812
Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

**BERITA ACARA ASISTENSI
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN (APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2026**

KALURAHAN : JEPITU
KAPANEWON : GIRISUBO

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah diselenggarakan Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan dihadiri oleh masing-masing Tim Asistensi dengan Pemerintah Kalurahan sebagai objek asistensi. Hasil Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 berupa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
1.	Kesepakatan dan persetujuan bersama atas rancangan APB Kalurahan antara Lurah dan Bamuskal belum dilampirkan.	Menyampaikan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan Tahun Anggaran 2026 kepada Bamuskal.
2.	Belum disajikan proyeksi SiLPA Tahun 2025.	Agar melakukan koreksi draft rancangan APBKal dengan menyajikan proyeksi SiLPA Tahun 2025.
3.	Belum disajikan Pengeluaran Pembiayaan.	Agar melakukan koreksi draft rancangan APBKal dengan menyajikan Pengeluaran Pembiayaan.
4.	Terdapat penganggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bamuskal menggunakan DDS.	Agar tidak menganggarkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bamuskal menggunakan DDS.
5.	Terdapat penganggaran belanja Dukungan Kegiatan Seremonial menggunakan DDS.	Agar tidak menganggarkan belanja Dukungan Kegiatan Seremonial menggunakan DDS.

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
6.	Terdapat penganggaran Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak berupa Pajak Kendaraan menggunakan DDS.	Agar tidak menganggarkan Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak berupa Pajak Kendaraan menggunakan DDS.
7	<p>Kalurahan Jepitu bukan merupakan Kalurahan lokus stunting. Dalam rangka penanggulangan stunting, Kalurahan belum menganggarkan kegiatan pendukung penanggulangan stunting antara lain :</p> <p>a. Melibatkan Puskesmas dan Penyuluh Keluarga Berencana dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan</p> <p>b. Menganggarkan kegiatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penurunan stunting sesuai hasil Musyawarah Kalurahan mengenai stunting dengan fokus kegiatan penanganan stunting pada penguatan TPPS Kalurahan dan kegiatan yang mendukung intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi koordinatif sesuai dengan basis data sasaran stunting antara lain Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil, bayi dan balita, Jamban Sehat, RTLH. Belum memberikan prioritas kepada Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang berada pada desil1-5 dalam pemilihan penerima bantuan stimulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)</p> <p>c. memilih kamus usulan Pagu Indikatif Sektoral (PIS) dan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) yang mendukung penanggulangan stunting sesuai kebutuhan masing masing kalurahan.</p>	<p>Direkomendasikan kepada Lurah Jepitu untuk meningkatkan komitmen perencanaan dan penganggaran dalam rangka menurunkan prevalensi stunting antara lain dengan melibatkan Puskesmas dan Penyuluh Keluarga Berencana dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan, penganggaran APBKal yang mendukung penanggulangan stunting melalui penguatan Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) Kalurahan, intervensi spesifik, intervensi sensitif dan intervensi koordinatif, memberikan prioritas kepada Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang berada pada desil1-5 dalam pemilihan penerima bantuan stimulan jamban sehat dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta memilih kamus usulan Pagu Indikatif Sektoral (PIS) dan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) yang mendukung penanggulangan stunting sesuai kebutuhan masing masing kalurahan</p>

Tanggapan Obyek Pemeriksaan :

Kami sependapat atas kesimpulan asistensi dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi maksimal tanggal 22 Desember 2025;

Sebagai bukti tindak lanjut akan kami serahkan hasil koreksi atas Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 ke Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal 22 Desember 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.


Sudarta

Wonosari 17 Desember 2025

Ketua Tim,



Anton Prihutono, SE

NIP 198311292011011004

DPMKP2KB



Mirta Kurniawati, S.Ak

NIP 199708052022032019

Pengendali Teknis,



Fithriyatun Nisa, S.Farm

NIP 198406302006042008

Kapanewon



Karyanto, SIP

NIP 197105201997041001

Pendamping Kabupaten



Arif Prabowo, S.Pd.I



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GIRISUBO

ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦒꦶꦫꦶꦱꦸꦧꦺ

Jalan Sadeng Km. 12 Girisubo, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55883
Laman girisubo.gunungkidulkab.go.id; Posel girisubo@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU GIRISUBO

NOMOR **056/KPTS/2025**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN JEPITU

KAPANEWON GIRISUBO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN JEPITU TAHUN ANGGARAN 2025

PANEWU GIRISUBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jepitu Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Jepitu Kapanewon Girisubo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jepitu Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

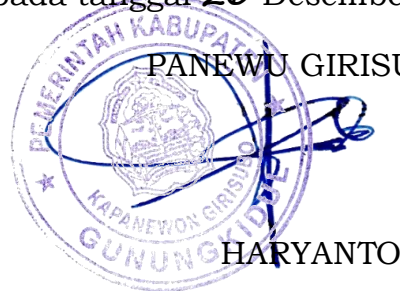
Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN JEPITU KAPANEWON GIRISUBO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN JEPITU TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Jepitu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Girisubo

pada tanggal **26** Desember 2025



PANEWU GIRISUBO,

HARYANTO

Tembusan:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul (sebagai laporan);
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Jepitu.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANEWU GIRISUBO
 NOMOR **056**/KPTS/2025
 TENTANG
 HASIL EVALUASI RANCANGAN
 PERATURAN KALURAHAN JEPITU
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
 JEPITU TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN JEPITU
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

No	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.		√	Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/ Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; c) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan APB Kalurahan; d) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan/ Perubahan RKP

No	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
					<p>Kalurahan tahun berkenaan;</p> <p>e) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal;</p> <p>f) Dokumen pendukung lainnya antara lain;</p> <p>Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam Perubahan APB Kalurahan.</p> <p>Belum melampirkan Perkal tentang</p>

No	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
					penyetaan modal BUMKal
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	√		1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan.			1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir, dan Notulen Musyawarah	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal. Belum melampirkan undangan, daftar hadir, dan notulen musyawarah.
1.4	Apakah yang teranggarkan dalam rancangan Perubahan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	√		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansi kebijakan penganggarannya.

No	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan administratif :					
Peraturan Kalurahan:					
<ul style="list-style-type: none"> Dari judul perkal, format hingga kalimat-kalimat dalam pasal-pasal agar disesuaikan dengan contoh yang terlampir pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018. 					
Peraturan Lurah:					
<ul style="list-style-type: none"> Dari judul perlur, format hingga kalimat-kalimat dalam pasal-pasal agar disesuaikan dengan contoh yang terlampir pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018. 					

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal Perubahan APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.		√	- Perkal RKPKal - Perkal Perubahan RKPKal	
2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	√		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal - Rancangan Perkal Perubahan APBKal	Kelompok pendapatan: - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
2.4	Apakah estimasi Pendapatan	√			

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
	Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.				
2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			
2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√			
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	√			
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				Tidak ada
2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Perubahan APB Kalurahan paling banyak 30%	√			Penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan: Rp. 635.758.300,00

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
	dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.				Tunjangan dan operasional bamuskal: Rp62.690.280,00 Total Belanja: Rp2.265.561.598,00 Persentase: 30,82%
2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	√			
2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif RT/RW telah dianggarkan.	√			
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW	√			
2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur	√			
2.14	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah sesuai dengan prioritas	√			

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
	penggunaan Dana Desa.				
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	√			
2.16	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	√			
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan		√		Lihat “kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran” nomor 2.17
2.18	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	√			
2.19	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	√			
2.20	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan				Tidak ada
2.21	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan				Tidak ada

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
	dengan Peraturan Kalurahan				
2.22	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan	√			
2.23	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha		√		Belum ditetapkan dengan perkal.
2.24	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	√			
2.25	Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai	√			

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
	sumber dana awalnya				
2.26	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	√			

Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran:

2.17

- a. Pada kegiatan pelatihan, peningkatan kapasitas dan kegiatan sejenisnya untuk belanja transport peserta agar dirubah menjadi perjalanan dinas Kalurahan tidak pada belanja jasa honorarium lainnya;
- b. Pada semua kegiatan fisik untuk upah tenaga kerja agar dianggarkan BPJS ketenaga kerjaan;
- c. Belum menganggarkan kegiatan KDMP pada kegiatan pembiayaan;
- d. Pada kegiatan 1.1.08 operasional Pemerintahan Kalurahan/Desa yang bersumber dari Dana Desa masih menganggarkan kegiatan Ceremonial agar kegiatan Ceremonial di masukan kedalam kerekening kegiatan;
- e. Pada kegiatan 4.5.99 lain-lain sub bidang koperasi UMKM anggaran dukungan KDMP agar dipindahkan ke rekening pembiayaan.
- f. Belum menganggarkan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan keadaan darurat (5.1.00 dan 5.2.00)
- g. Penganggaran dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan seagai Peraturan Kalurahan Jepitu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026, sah apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan.

2.23

- a. Penyertaan modal BUMKal belum ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Agar ditetapkan dengan Perkal.


 PANEWU GIRISUBO,
 HARYANTO